

ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN REKLAMASI TELUK LAMONG DI KELURAHAN TAMBAK OSOWILANGUN KELURAHAN BENOWO KOTA SURABAYA

Muhammad Roikhan

S-1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
Email: muhammadroikhan95@gmail.com

Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP.

D-III Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Kebijakan reklamasi Teluk Lamong merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelindo III untuk Pengurugan (Reklamasi) Perairan Pantai Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teori unit-unit sosial pedampak meliputi dampak individu, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat dan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi reduksi, data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi dampak terhadap reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun. Dampak tersebut meliputi dampak individual berupa pemberian bantuan kesehatan, terciptanya lapangan pekerjaan baru, penurunan pendapatan para nelayan dan rasa terganggu akibat aktivitas bongkar muat pelabuhan Teluk Lamong. Dampak organisasi berupa pembangunan tempat ibadah dan fasilitas publik yang diberikan kepada Kelurahan Tambak Osowilangun. Untuk HNSI Tambak Osowilangun mendapatkan bantuan berupa pendopo dan kemudahan dalam pengajuan permohonan dana untuk kegiatan organisasi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa reklamasi Teluk Lamong juga berdampak pada berkurangnya jumlah anggota HNSI di Kelurahan Tambak Osowilangun. Dampak terhadap masyarakat berupa banjir di jalan raya dan kesulitan dalam membeli ikan laut, disisi lain beberapa masyarakat merasa diuntungkan dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru dan beberapa bantuan dari PT. Teluk Terminal Lamong. Sedangkan dampak terhadap lembaga dan sistem sosial dapat dilihat dari terjadinya perubahan peran HNSI Tambak Osowilangun yang awalnya berperan sebagai wadah berkumpulnya nelayan untuk menjual hasil tangkapan nelayan kini bergeser peran menjadi lembaga sosial yang memperjuangkan nasib nelayan.

Kata kunci : Dampak, Reklamasi, Kebijakan

Abstract

Lamong bay reclamation policy is one of the policies issued by the Central Government through a decision of the Minister of transportation number 4 Year 1997 regarding the granting of Permission to the PT Pelindo III for Pengurugan (Reclaimed) coastal waters In The area of the working environment and the waters of Tanjung Perak Port of Gresik. The purpose of this study was to describe the impact of reclamation policies regarding Gulf Lamong in Kelurahan of Tambak Osowilangun in Surabaya. This type of research i.e. qualitative research used by using the theory of social impact units include the impact of individual, organizational impact, impact on society and its impact on institutions and social systems. Data collection techniques used by observation, interview and structured documentation while the data analysis techniques in this study using qualitative analysis techniques according to Miles and Huberman include reduction, data, presentation In conclusion, withdrawal/data verification. The results of this research indicate that there is an impact on the Bay reclaimed Lamong in Kelurahan of Tambak Osowilangun. These include the impact of individual impact in the form of the granting of health assistance, creation of new jobs, decreasing the income of the fishermen and the flavor is compromised due to the activity of loading and unloading Bay Harbor Lamong. The impact of the Organization in the form of the construction of places of worship and public facilities provided to the village Tambak Osowilangun. For the HNSI Embankment Osowilangun get help in the form of a Hall and ease in filing the application for funding for the activities of the organization. However it is undeniable that reclamation of the Bay Lamong also resulted in a reduced number of members of the HNSI Tambak Osowilangun. Impact on the community in the form of flooding on the highway and the difficulty in buying the fish of the sea, on the other hand some communities feel benefitted with the availability of new jobs and some help from PT. Lamong Terminal Bay. While the impact on institutions and social

systems can be seen from the occurrence of the change of the role of the HNSI Pond Osowilangun who initially acts as a gathering of fishermen to sell the container catches of fishermen now shifted roles to become an institution social fight for the fate of the fishermen.

Keywords: Impact, Reclamation, Policy

PENDAHULUAN

Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 menegaskan konsepsi wawasan nusantara memberikan pengaruh yang luar biasa, baik itu laut, darat maupun udara. Berkaitan dengan deklarasi tersebut, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki wilayah laut seluas 5,8 juta km², yang terdiri dari wilayah teritorial seluas 3,2 juta km² dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta km². Selain itu, yang paling menarik ialah sekitar 17.504 pulau dimiliki Indonesia dengan garis pantai sepanjang 95.181 km (DEPDAGRI 2016). Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai garis pantai terpanjang keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Rusia. Garis pantai atau yang lebih dikenal dengan kawasan pesisir memiliki potensi sumberdaya yang sangat besar dan sekaligus merupakan peluang untuk meningkatkan kegiatan ekonomi produktif.

Kawasan pesisir yang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan dapat memberikan sumbangsih yang sangat berarti dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat maupun devisa negara. Oleh karena itu, sejak tahun 2007 pemerintah bersama legislatif bersepakat untuk menyusun sekaligus mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini membuktikan bahwa Pemerintah Pusat dan DPR RI memandang perlu adanya produk hukum yang dapat menjadi payung hukum pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, mengingat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah yang rawan konflik.

Di Indonesia, wilayah pesisir yang terbentang dari sabang hingga merauke yang kaya dan beragam sumber daya alamnya telah dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu sumber bahan makanan utama, khususnya protein hewani. Selain menyediakan berbagai sumber daya tersebut, wilayah pesisir Indonesia memiliki berbagai fungsi lain, seperti transportasi dan pelabuhan, kawasan industri, agribisnis dan agroindustri, rekreasi dan pariwisata, serta kawasan pemukiman dan tempat pembuangan limbah. Salah satu ide pembangunan yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia adalah konsep reklamasi. Reklamasi dapat didefinisikan sebagai suatu usaha perbaikan, pemanfaatan, pemulihan kemampuan, dan peningkatan kualitas lahan melalui pemberdayaan berbagai teknologi dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada lahan yang secara alami berkualitas rendah atau sebagai akibat dari pengaruh manusia yang menyebabkan lahan tersebut kurang produktif (Suhardjono dkk, 2010: 3).

Kota Surabaya yang merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di wilayah Jawa Timur sepertinya tidak ingin kalah dalam urusan reklamasi. Untuk menunjang kebutuhan sebagai kota

metropolitan, Surabaya dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda, serta beberapa pelabuhan, yakni Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung dan yang paling baru yang dibangun diatas lahan reklamasi adalah Terminal Teluk Lamong. Terminal Teluk Lamong dibangun di tengah laut, sekitar 2 km dari bibir pantai Tambak Osowilangun. Lokasi proyek berbasis reklamasi tersebut dihubungkan dengan jembatan yang bermuara di pantai Tambak Osowilangun. Menurut data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) PT. Pelindo III tahun 2016, pembangunan tahap awal dibangun seluas 50 Ha dengan kapasitas terminal petikemas 1 juta TEU's. Terminal Teluk Lamong yang dibangun sejak tahun 2010 dan diresmikan pada pertengahan tahun 2014 tersebut menjadi pelabuhan satu-satunya di Indonesia yang berada di tengah laut. Karena dibangun ditengah laut, tentunya terdapat proses reklamasi yang dilakukan, adapun reklamasi Teluk Lamong dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1:
Pembangunan tahap I Reklamasi Terminal Teluk Lamong



Sumber : www.antaraneews.com

Yang menjadi pusat perhatian masyarakat Surabaya dan Jawa Timur adalah pembangunan Terminal Teluk Lamong tersebut dilakukan diatas lahan reklamasi yang berada di Teluk Lamong Selat Madura, reklamasi tersebut memang telah mendapatkan izin reklamasi melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelindo III Untuk Pengurangan (Reklamasi) Perairan Pantai Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik. Selain itu, proyek reklamasi Teluk Lamong tersebut telah lulus uji AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Meski telah mengantongi izin, namun tetap terjadi ketidaksetujuan dari warga sekitar. Hal ini dikarenakan adanya kekhawatiran masyarakat

Surabaya khususnya nelayan di Kelurahan Tambak Osowilangun terhadap keberlangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong di kawasan Tambak Osowilangun, Surabaya, yang kemudian tertuang dalam penelitian yang berjudul **“Analisis Dampak Kebijakan Reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kelurahan Tambak Osowilangun Kecamatan Benowo Kota Surabaya. Sedangkan fokus penelitian ini adalah menganalisis dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun Kota Surabaya dengan menggunakan teori unit-unit sosial pedampak dari Wibawa, yang menyebutkan bahwa terdapat empat unit pedampak yaitu:

1. Dampak Individual

Dampak terhadap individu dapat menyentuh aspek psikologis, ekonomi dan lingkungan hidup. Dampak psikologis biasanya menyangkut stress, depresi, kepercayaan diri, cinta dan emosi. Selanjutnya, dampak individual dalam penelitian ini adalah dampak yang dirasakan oleh perorangan yang dalam hal ini adalah nelayan yang berada di kelurahan Tambak Osowilangun.

2. Dampak Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok, baik secara langsung maupun tidak. Dampak dapat berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Dalam penelitian ini dampak terhadap organisasi peneliti memilih Kelurahan dan Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tambak Osowilangun.

3. Dampak terhadap Masyarakat

Masyarakat bukanlah unit sosial yang *goal-oriented* seperti organisasi. Ia adalah suatu unit yang melayani para anggotanya. Dampak suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya, sehingga dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat kelurahan Tambak Osowilangun, baik anggota HNSI Tambak Osowilangun maupun yang bukan anggota namun merasakan adanya dampak dari kebijakan reklamasi Teluk Lamong.

4. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Kebijakan yang dimaksud tidak hanya untuk mengubah atau mempengaruhi lembaga-lembaga, melainkan kebijakan tersebut akan mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam sistem sosial merupakan akibat dari banyak faktor, bukan hanya merupakan akibat atau dampak dari sebuah kebijakan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data-data primer ini berupa data hasil wawancara dari *key informan* dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, dimana informan yang dipilih merupakan pihak yang dianggap paling mengetahui dan memahami tentang dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun. Dilengkapi juga dengan catatan hasil observasi yang ditemui selama dilapangan. *Key Informan* dalam penelitian ini antara lain :

- a. Staff Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya
- b. Sekretaris Kelurahan Tambak Osowilangun Kota Surabaya
- c. Humas PT. Terminal Teluk Lamong
- d. Ketua, sekretaris dan anggota Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia di Kelurahan Tambak Osowilangun
- e. Masyarakat yang Kelurahan Tambak Osowilangun

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia, sehingga peneliti tinggal mencari dan mengumpulkannya. Dalam hal ini data-data yang diperoleh berupa arsip dari Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, PT. Terminal Teluk Lamong, HNSI dan Kelurahan Tambak Osowilangun. Data-data lain yang diperoleh dari studi kepustakaan dan *website*.

Pada penelitian dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan pada teknik analisis data menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan tertentu dengan yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan masalah tertentu yang ada di masyarakat (Anderson dalam Islamy, 2009:19). Pemerintah Pusat melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelindo III untuk Pengurangan (Reklamasi) Perairan Pantai Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Gresik. Yang kemudian ditegaskan oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan merekomendasikan lahan reklamasi pada tahun 2004 yakni seluas 386,12 Ha.

Namun pada akhirnya direvisi melalui rekomendasi Gubernur Jawa Timur pada tahun 2005 tentang luas lahan reklamasi yakni menjadi 50 Ha. Dalam implementasinya reklamasi Teluk Lamong yang diperuntukkan sebagai pelabuhan tersebut mendapat penolakan dari beberapa warga sekitar terutama para

nelayan yang ada di Kota Surabaya khususnya nelayan Tambak Osowilangun. Penolakan terhadap aktifitas reklamasi yang ada di Teluk Lamong tersebut beralasan karena banyak masyarakat sekitar terutama nelayan Tambak Osowilangun menggantungkan hidup pada ekosistem laut yang ada di Teluk Lamong. Apabila masyarakat sekitar kehilangan pekerjaan maka secara otomatis kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun fakta menarik dilapangan menyebutkan bahwa tidak semua nelayan yang ada di Kelurahan Tambak Osowilangun menolak adanya reklamasi tersebut, hal ini terjadi karena adanya janji terciptanya lapangan kerja baru bagi warga sekitar.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa dalam implementasi reklamasi Teluk Lamong yang diperuntukkan sebagai pelabuhan internasional tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat di Kelurahan Tambak Osowilangun. Untuk mengetahui lebih menyeluruh terkait dampak reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun maka peneliti menggunakan teori Wibawa (1994) tentang unit-unit sosial pedampak. Menurut Wibawa (1994:29) dampak memberikan perhatian yang lebih besar kepada output dibandingkan dengan proses pelaksanaannya. Adapun pembahasan dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong yang didasarkan pada teori Wibawa (1994:54) adalah sebagai berikut:

1. Dampak Individu

Dampak terhadap individu merupakan segala sesuatu yang dapat menyentuh aspek-aspek psikologi, ekonomi dan lingkungan hidup. Dengan adanya kebijakan reklamasi Teluk Lamong berdampak terhadap individu yang ada di Kelurahan Tambak Osowilangun. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi, dampak individual berupa dampak psikologis, ekonomi dan lingkungan hidup. Secara psikologi kebijakan reklamasi Teluk Lamong yang diperuntukkan sebagai pelabuhan tersebut memberikan dampak berupa rasa terbantu karena adanya berbagai bantuan yang diberikan oleh PT. Terminal Teluk Lamong melalui program CSR, bantuan tersebut berupa pengobatan gratis, khitan massal, sembako murah serta pemberian lapangan pekerjaan baru bagi warga/individu yang memenuhi kualifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti, menyebutkan bahwa aktivitas bongkar muat pelabuhan Teluk Lamong dapat mengganggu beberapa individu di Kelurahan Tambak Osowilangun dikarenakan sebelum masuk kedalam pelabuhan beberapa truk *container* yang menunggu giliran masuk diluar area pelabuhan memarkir kendaraan di sekitar pintu masuk pelabuhan yang berdekatan dengan tempat tinggal warga. Dampak individual lainnya yakni dampak ekonomi, beberapa individu merasa mengalami kondisi ekonomi yang lebih baik hal ini dikarenakan setelah tidak menjadi nelayan mereka beralih profesi menjadi *cleaning service*, supir ataupun buruh serabutan di pelabuhan Teluk Lamong dengan penghasilan yang lebih banyak dibandingkan menjadi nelayan. Kondisi sebaliknya terjadi pada

nelayan yang tidak beralih profesi, nelayan yang masih bertahan mengalami penurunan penghasilan karena tempat bekerja para nelayan kini telah direklamasi.

Selain itu, adanya reklamasi Teluk Lamong juga berimbas pada kerusakan lingkungan hidup yang ada di Kelurahan Teluk Lamong, tidak tanggung-tanggung kerusakan tersebut berupa rusaknya kawasan hutan mangrove seluas 16,604 Ha yang menurut analisis peneliti berujung pada rusaknya ekosistem laut seperti ikan, terumbu karang maupun kerang yang ada di perairan Teluk Lamong dan Selat Madura. Dengan rusaknya ekosistem laut di Kelurahan Tambak Osowilangun secara otomatis akan mempengaruhi penghasilan bagi nelayan maupun penduduk sekitar Teluk Lamong yang menggantungkan hidup pada hasil laut.

2. Dampak Organisasional

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak terhadap organisasi atau kelompok baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak dapat berupa terganggu atau terbantunya organisasi atau kelompok dalam mencapai tujuannya. Jelasnya, karena misi organisasi adalah mencapai tujuan tertentu, maka yang dimaksud dengan dampak organisasional dari suatu kebijakan adalah seberapa jauh kebijakan tersebut membantu atau mengganggu pencapaian tujuan-tujuan suatu organisasi.

Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menyebutkan bahwa kebijakan reklamasi Teluk Lamong memberikan dampak organisasional yakni berupa adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada Kelurahan Tambak Osowilangun. Bantuan tersebut berupa pembangunan dan perbaikan tempat ibadah serta fasilitas umum. Dampak hampir serupa juga dirasakan oleh organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tambak Osowilangun, yang menurut hasil wawancara dan observasi peneliti menyebutkan bahwa pengurus HNSI merasa terbantu dengan adanya kemudahan dalam hal pengajuan dana untuk kegiatan HNSI, bantuan pendopo untuk berkumpulnya para nelayan dan tersedianya lapangan pekerjaan harian lepas (*freelance*) yang diprioritaskan untuk anggota HNSI Kelurahan Tambak Osowilangun.

Selain adanya dampak berupa bantuan terhadap organisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa reklamasi Teluk Lamong berdampak pada terganggunya tujuan dari organisasi HNSI Tambak Osowilangun. Sebelum adanya reklamasi Teluk Lamong jumlah anggota nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tambak Osowilangun sejumlah 215 nelayan, namun setelah kebijakan reklamasi Teluk Lamong dilaksanakan, kini HNSI Tambak Osowilangun hanya beranggotakan 122 nelayan dengan status anggota yang aktif hanya 25 nelayan. Berkurangnya jumlah anggota nelayan HNSI Tambak Osowilangun mengakibatkan tujuan organisasi ini terhambat, tujuan tersebut meliputi pengkaderan dan eksistensi organisasi.

3. Dampak terhadap Masyarakat

Dampak dari suatu kebijakan terhadap masyarakat menunjuk pada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi kapasitas masyarakat dalam melayani anggotanya. Menurut beberapa pernyataan masyarakat yang tidak tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tambak Osowilangun, adanya reklamasi dan pembangunan pelabuhan Teluk Lamong mengakibatkan dampak negatif berupa banjir, polusi udara dan kesulitan dalam membeli ikan laut. Dampak Menurut hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa tinggi permukaan laut dan daratan yang ada di Kelurahan Tambak Osowilangun hanya berjarak 1 meter sehingga ketika Teluk Lamong direklamasi maka air laut yang ada di Teluk Lamong dapat meluber ke area sekitar Teluk Lamong termasuk jalan raya Tambak Osowilangun yang hanya berjarak 2 km dari letak reklamasi.

Disisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan Teluk Lamong, keuntungan tersebut berupa tersedianya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun. Ketersediaan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun tersebut tidak serta merta diberikan begitu saja, mereka harus melalui proses pelatihan dan seleksi selanjutnya proses rekrutmen pada umumnya.

Dampak terhadap masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun lainnya berupa adanya program CSR PT. Terminal Teluk Lamong yang diprioritaskan bagi masyarakat Tambak Osowilangun sebagai wilayah ring 1 area terdampak reklamasi, beberapa bantuan yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun diantaranya adalah bantuan pengobatan gratis, khitanan massal, sembako gratis serta pemberdayaan masyarakat berupa kursus mengemudi truk dan pembuatan SIM B1. Berbagai bantuan yang diberikan merupakan kepedulian PT. Terminal Teluk Lamong terhadap masyarakat disekitar Pelabuhan Teluk Lamong.

4. Dampak terhadap Lembaga dan Sistem Sosial

Kebijakan yang dimaksud tidak hanya untuk mengubah atau mempengaruhi lembaga-lembaga, melainkan kebijakan tersebut dapat mempengaruhi berbagai dimensi sosial yang lain. Dengan adanya perubahan yang terjadi dalam sistem sosial merupakan akibat dari berbagai faktor, bukan hanya akibat dari suatu kebijakan. Dalam hal ini kebijakan reklamasi Teluk Lamong memberikan dampak yang besar terhadap lembaga dan sistem sosial yang ada di Kelurahan Tambak Osowilangun.

Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial yang terjadi di Kelurahan Tambak Osowilangun berupa peningkatan interaksi masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun, hal ini terjadi seiring dengan tersedianya fasilitas publik baru bantuan dari PT. Terminal Teluk Lamong yang dapat meningkatkan aktivitas sosial masyarakat sekitar. Reklamasi Teluk Lamong yang diperuntukkan sebagai pelabuhan

tersebut juga berdampak pada lembaga sosial HNSI, pada lembaga HNSI terjadi perubahan peran organisasi yang pada awalnya bertujuan utama untuk mempererat tali silaturahmi sesama nelayan, bertukar pendapat bagi para nelayan serta wadah berkumpulnya para nelayan Tambak Osowilangun untuk memasarkan hasil tangkapannya namun sekarang tujuan utamanya bergeser menjadi berjuang untuk mempertahankan kelangsungan organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Tambak Osowilangun serta berperan untuk mendapatkan kompensasi bagi para nelayan yang dirugikan.

Dampak terhadap sistem sosial lainnya dapat dilihat dari perubahan pola perilaku masyarakat yang diawali dengan beralih profesinya para nelayan menjadi *cleaning service*, supir bahkan buruh serabutan di pelabuhan Teluk Lamong. Beralihnya profesi tersebut tidak lepas dari peran PT. Terminal Teluk Lamong dalam memberikan program pemberdayaan masyarakat sekitar melalui program kejar paket C hingga kursus mengemudi truk dan pembuatan SIM B1 secara gratis.

Program tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun yakni berupa perubahan pola pikir baru terkait dengan optimisme mendapatkan pekerjaan. Perubahan pola pikir tersebut adalah rasa optimisme warga dalam memperoleh pekerjaan yang lebih baik mengingat untuk memperoleh pekerjaan sekerang rata-rata dibutuhkan ijazah minimal SMA. Rasa optimisme tersebut tumbuh dikarenakan peserta program kejar paket C nantinya mendapat kesempatan bekerja di PT. Terminal Teluk Lamong maupun di perusahaan lain.

PENUTUP

Simpulan

Kebijakan reklamasi Teluk Lamong yang dimulai pada tahun 2010 memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan di Kelurahan Tambak Osowilangun, untuk menjelaskan lebih detail peneliti menyajikan dalam unit-unit sosial pedampak sebagai berikut:

1. Dampak individual dalam penelitian ini yakni dampak psikologis, ekonomi dan lingkungan hidup. Secara psikologi kebijakan reklamasi Teluk Lamong memberikan dampak berupa rasa terbantu dengan adanya bantuan pengobatan gratis, khitan massal, sembako murah dan pemberian lapangan pekerjaan baru bagi warga/individu yang memenuhi kualifikasi. Disisi lain terdapat beberapa individu yang merasa terganggu akibat aktivitas bongkar muat disekitar tempat tinggal warga. Dampak individual lainnya yakni dampak ekonomi, beberapa individu yang beralih profesi mengalami peningkatan pendapatan sedangkan bagi individu yang tetap menjadi nelayan mengalami penurunan pendapatan. Selain itu, terdapat dampak individu berupa kerusakan lingkungan hidup, yakni rusaknya kawasan hutan mangrove di Kelurahan Tambak Osowilangun.

2. Kebijakan reklamasi Teluk Lamong memberikan dampak organisasional berupa pembangunan tempat ibadah dan fasilitas umum yang diberikan kepada Kelurahan Tambak Osowilangun. Dampak hampir serupa juga dirasakan oleh organisasi HNSI yang merasa terbantu dengan adanya kemudahan dalam hal pengajuan dana untuk kegiatan HNSI, bantuan pendopo untuk berkumpulnya para nelayan dan tersedianya lapangan pekerjaan harian lepas (*freelance*). Namun tidak dapat dipungkiri bahwa reklamasi Teluk Lamong menjadikan terganggunya tujuan pengkaderan dan eksistensi HNSI Tambak Osowilangun hal ini dikarenakan banyak anggota HNSI yang beralih profesi.
3. Adanya reklamasi dan pembangunan pelabuhan Teluk Lamong mengakibatkan dampak negatif berupa banjir, polusi udara dan kesulitan dalam membeli ikan laut, hal ini terjadi dikarenakan jumlah nelayan berkurang. Namun beberapa masyarakat Kelurahan Tambak Osowilangun merasa diuntungkan karena tersedianya lapangan pekerjaan baru melalui program CSR PT. Terminal Teluk Lamong yang diprioritaskan untuk diberikan kepada masyarakat Tambak Osowilangun.
4. Dampak terhadap lembaga dan sistem sosial yang terjadi di Kelurahan Tambak Osowilangun berupa peningkatan interaksi masyarakat seiring dengan tersedianya fasilitas publik baru yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar seperti tempat ibadah, lapangan futsal dan peralatan posyandu. Pada HNSI terjadi perubahan peran organisasi yang tujuan utamanya mempererat tali silaturahmi sesama nelayan berubah peran untuk berjuang mempertahankan organisasi HNSI dan mendapatkan kompensasi bagi para nelayan yang dirugikan. Dampak terhadap sistem sosial lainnya dapat dilihat dari perubahan pola perilaku masyarakat terkait dengan rasa optimis dalam mencari pekerjaan.

Saran

Sebagai akhir dari penelitian ini, saran yang dapat peneliti berikan terhadap adanya dampak kebijakan reklamasi Teluk Lamong di Kelurahan Tambak Osowilangun adalah sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan beberapa warga yang merasa terganggu oleh aktivitas bongkar muat, sebaiknya PT. Terminal Teluk Lamong menyediakan lahan parkir khusus untuk menampung truk *container* yang akan masuk ke pelabuhan dan membuat larangan untuk tidak memarkir kendaraan disekitar tempat tinggal warga.
2. Dampak negatif reklamasi Teluk Lamong terhadap organisasi dalam hal ini adalah organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dapat diatasi dengan dukungan yang berkelanjutan terhadap eksistensi organisasi. Dukungan tersebut dapat berupa bantuan bahan bakar dan peralatan untuk melaut bagi nelayan, dengan demikian dapat meminimalkan biaya operasional nelayan untuk mencari ikan dilaut.

3. Perlu adanya peran aktif pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi banjir tahunan yang terjadi di Kelurahan Tambak Osowilangun.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing Hj. Weni Rosdiana, S.Sos., M.AP. serta mengucapkan terima kasih kepada Dosen Penguji Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. dan Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Akdon dan Riduwan. 2007. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dagun M. Save.1997. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Golo Riwu
- Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dunn, N. Willliam. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Kaelola, A. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala.
- Makhya, Syarief. 2006. *Ilmu Pemerintahan (Telaah Awal)*. Bandar Lampung : Universitas Lampung Press..
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurbuko, Cholid dan Achmac., 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Samodra, Wibawa., Yuyun . P dan Agus P. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : CV. ALFABETA
- Suhardjono, dkk. 2010. *Reklamasi Daerah Rawa Untuk Pengembangan Persawahan*. Malang : Citra Malang
- Wahab, Abdul Solichin. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Widodo, Joko. 2012. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media Publishing.

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Pringwulung : CAPS (*Center for Academic Publishing Service*). Edisi Revisi Terbaru.

Peraturan Perundang-Undangan:

DirJend Pesisir dan Pulau-pulau Kecil DKP RI, Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir, Jakarta.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pemberian Izin Kepada PT. Pelindo III Untuk Pengurangan (Reklamasi) Perairan Pantai Di Daerah Lingkungan Kerja Perairan Pelabuhan Tanjung Perak Dan Pelabuhan Gresik.

Modul Terapan Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil serta dokumentasi dilapangan yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Lamong Surabaya.

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2014-2034.

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Teluk Lamong.

Jurnal Ilmiah :

Akib, Haidar. 2010. *Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa, dan Bagaimana*. Jurnal Administrasi Publik, Volume I No. I Tahun 2010

Budianto, Deka. 2006. *Evaluasi Program Gerakan Sayang Ibu di Kabupaten Bantul*. Skripsi. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada Press.

Mustaqim, Ibnu. 2015. *"Dampak Reklamasi Pantai Utara Jakarta Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Tinjauan Sosiologis Masyarakat di Sekitaran Pelabuhan Muara Angke, Kelurahan Pluit, Jakarta Utara)"*. Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Puspitasari, Tri. 2014. *"Dampak Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MP) Di Desa Sidokumpul Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban (Studi Pada Pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak PKK 01 Sidokumpul)"* Jurnal Mahasiswa Unesa

Tri Dharma Yanti, Ananda dkk. 2013. *"Dampak Kebijakan Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Wilayah Jembatan Suramadu (Studi Di Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)"*. Jurnal Administrasi Publik (JAP). Volume 1, Nomor 2 Tahun 2013.

Website :

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *"Daftar Pulau di Indonesia"*, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pulau_di_Indonesia, pada tanggal 10 Oktober 2016 pukul 00.13 WIB

http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/permen40.pdf (diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 17.24 WIB)

http://peraturan.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/1_PERMEN_KP2014.pdf (diakses pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 17.41 WIB)

<https://tirto.id/menebar-reklamasi-di-negara-ribuan-pulau-Fdu> (diakses pada tanggal 12 Maret 2017 pukul 07.06 WIB)